

Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024 “Tantangan Pelik di Tahun Pemilu”

Dr Ferry Irawan, S.E., M.S.E
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Jakarta, 6 Desember 2023



KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

PEMERINTAH TERUS MEWASPADAI RISIKO KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Volatility Index (MA-1M)



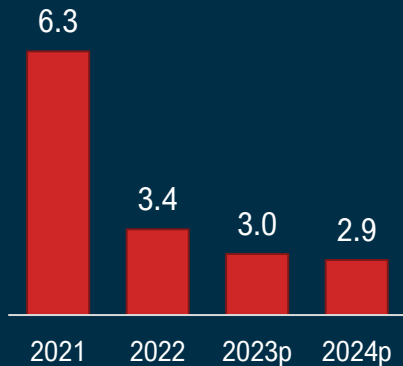
Sumber: Bloomberg

Geopolitical Risk Index



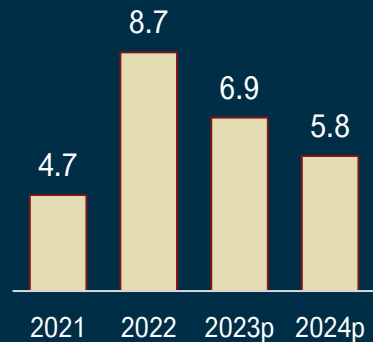
Sumber: CEIC

Global GDP Projection (%)

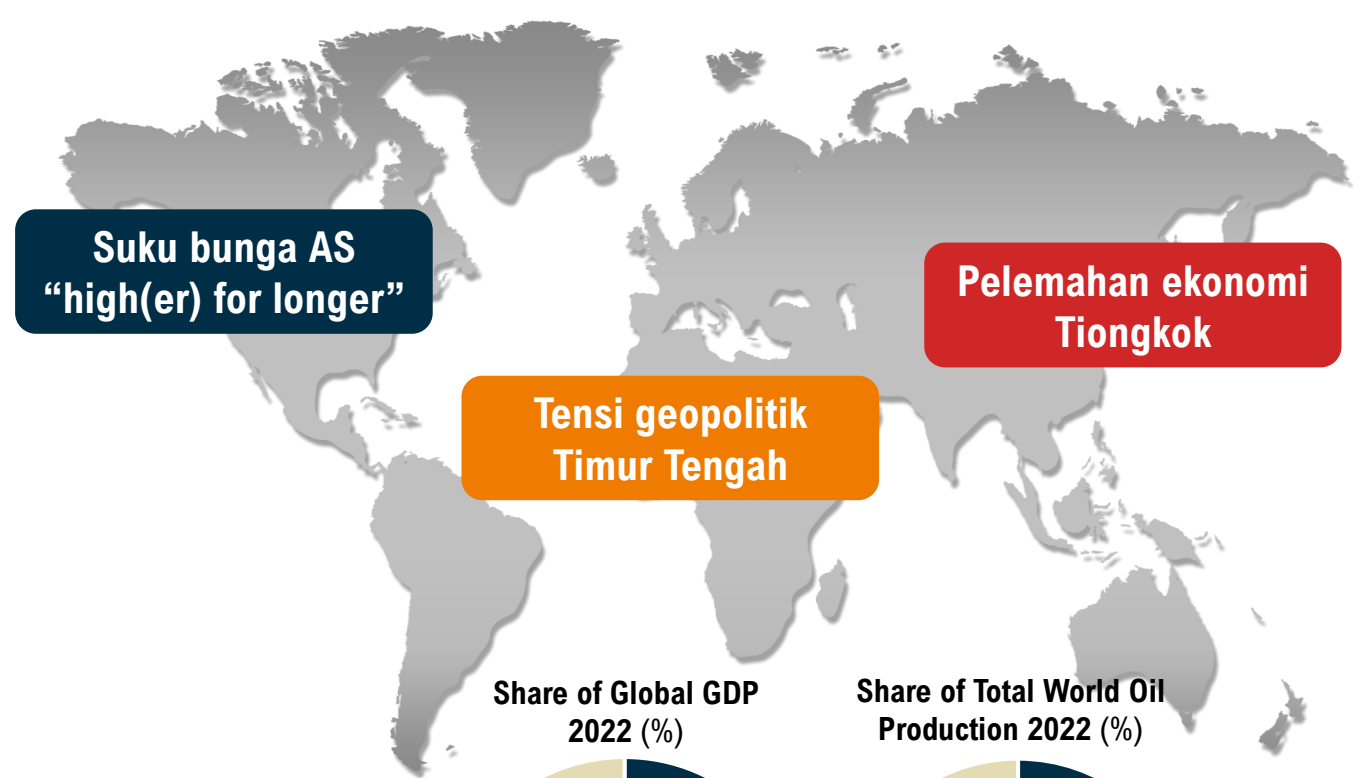


Sumber: IMF, WEO Oktober 2023

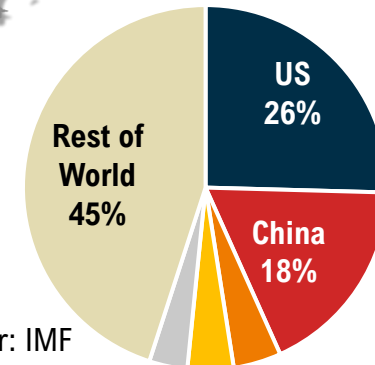
Global Inflation Projection (%)



Sejumlah Risiko Ketidakpastian Ekonomi Global

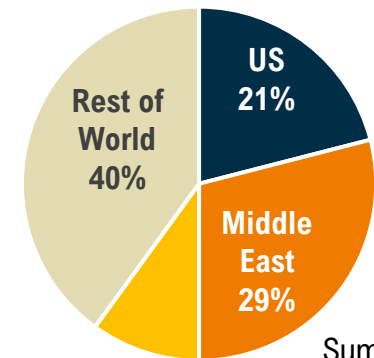


Share of Global GDP 2022 (%)



Sumber: IMF

Share of Total World Oil Production 2022 (%)



Sumber: EIA

NAMUN PERTUMBUHAN EKONOMI MITRA DAGANG SEPERTI INDIA DAN ASEAN MASIH RELATIF BAIK, BERPOTENSI MENOPANG KINERJA EKSPOR INDONESIA 2024

	2022	Projections		Difference from July 2023 WEO Update ¹		Difference from April 2023 WEO ¹	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
World Output	3.5	3.0	2.9	0.0	-0.1	0.2	-0.1
Advanced Economies	2.6	1.5	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0
United States	2.1	2.1	1.5	0.3	0.5	0.5	0.4
Euro Area	3.3	0.7	1.2	-0.2	-0.3	-0.1	-0.2
Germany	1.8	-0.5	0.9	-0.2	-0.4	-0.4	-0.2
France	2.5	1.0	1.3	0.2	0.0	0.3	0.0
Italy ²	3.7	0.7	0.7	-0.4	-0.2	0.0	-0.1
Spain	5.8	2.5	1.7	0.0	-0.3	1.0	-0.3
Japan	1.0	2.0	1.0	0.6	0.0	0.7	0.0
United Kingdom ²	4.1	0.5	0.6	0.1	-0.4	0.8	-0.4
Canada	3.4	1.3	1.6	-0.4	0.2	-0.2	0.1
Other Advanced Economies ³	2.6	1.8	2.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0
Emerging Market and Developing Economies	4.1	4.0	4.0	0.0	-0.1	0.1	-0.2
Emerging and Developing Asia	4.5	5.2	4.8	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3
China	3.0	5.0	4.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3
India ⁴	7.2	6.3	6.3	0.2	0.0	0.4	0.0
Emerging and Developing Europe	0.8	2.4	2.2	0.6	0.0	1.2	-0.3
Russia	-2.1	2.2	1.1	0.7	-0.2	1.5	-0.2
Latin America and the Caribbean	4.1	2.3	2.3	0.4	0.1	0.7	0.1
Brazil	2.9	3.1	1.5	1.0	0.3	2.2	0.0
Mexico	3.9	3.2	2.1	0.6	0.6	1.4	0.5
Middle East and Central Asia	5.6	2.0	3.4	-0.5	0.2	-0.9	-0.1
Saudi Arabia	8.7	0.8	4.0	-1.1	1.2	-2.3	0.9
Sub-Saharan Africa	4.0	3.3	4.0	-0.2	-0.1	-0.3	-0.2
Nigeria	3.3	2.9	3.1	-0.3	0.1	-0.3	0.1
South Africa	1.9	0.9	1.8	0.6	0.1	0.8	0.0
<i>Memorandum</i>							
World Growth Based on Market Exchange Rates	3.0	2.5	2.4	0.0	0.0	0.1	0.0
European Union	3.6	0.7	1.5	-0.3	-0.2	0.0	-0.1
ASEAN-5 ⁵	5.5	4.2	4.5	-0.4	0.0	-0.3	-0.1
Middle East and North Africa	5.6	2.0	3.4	-0.6	0.3	-1.1	0.0
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.0	4.0	3.9	0.1	0.0	0.1	-0.1
Low-Income Developing Countries	5.2	4.0	5.1	-0.5	-0.1	-0.7	-0.3

Sumber: WEO IMF, Oktober 2023

FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI INDONESIA RELATIF LEBIH BAIK DAN MENARIK DI ANTARA NEGARA PEERS

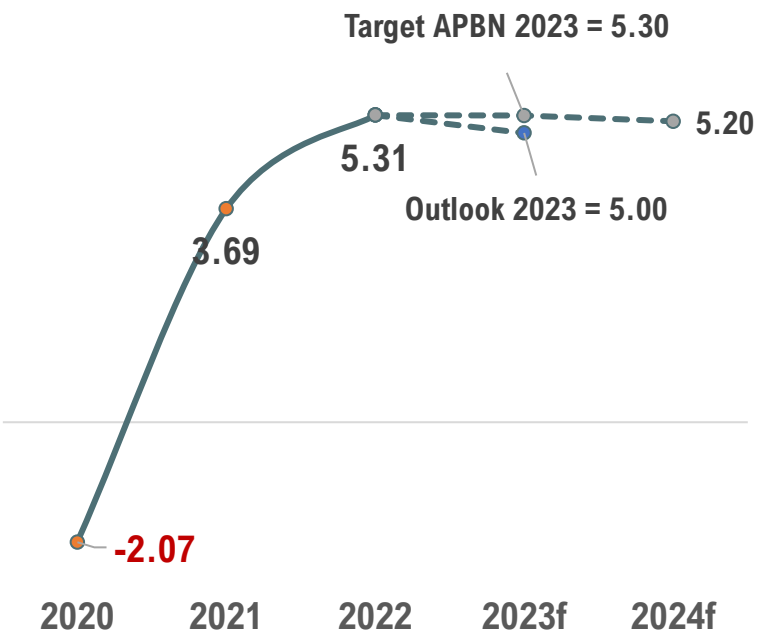
Rankings		Macroeconomic Indicators								Sovereign Ratings		
Country		GDP per Capita (USD)	GDP Growth (%YoY)	CPI (%YoY)	Current Account Balance (% of GDP)	Fiscal Balance (% of GDP)	Foreign Direct Investment (% of GDP)	Real Yield (%)	Government Debt (% of GDP)	Moody's Rating	S&P Ratings	Fitch Rating
1	Taiwan	32,756	2.3	3.0	14.2	1.2	0.1	-1.7	29.7	Aa3	AA+	AA
2	China	12,733	4.9	-0.2	1.4	-4.1	-0.3	2.9	21.5	A1	A+	A+
3	Indonesia	4,783	4.9	2.9	-0.2	-0.03	1.4	3.9	38.1	Baa2	BBB	BBB
4	Chile	15,158	0.6	5.0	-5.7	1.4	8.1	0.9	37.2	A2	A	A-
5	Peru	7,537	-1.0	3.8	0.1	-2.9	2.5	3.3	32.4	Baa1	BBB	BBB
6	Thailand	7,498	1.5	-0.3	2.7	-3.3	0.2	3.3	54.9	Baa1	BBB+	BBB+
7	Malaysia	12,454	3.3	1.8	2.0	-6.7	1.6	2.0	63.8	A3	A-	BBB+
8	Poland	18,221	0.7	6.6	0.0	-3.7	5.9	-0.8	48.3	A2	A-	A-
9	Mexico	11,307	3.3	4.3	0.6	-4.0	0.2	6.0	50.9	Baa2	BBB	BBB-
10	Czech Republic	26,818	-1.0	8.5	-0.5	-3.3	0.4	-3.8	44.3	Aa3	AA-	AA-
11	India	2,452	7.6	4.9	-1.1	-6.4	0.9	2.4	58.3	Baa3	BBB-	BBB-
12	Philippines	3,624	5.9	4.9	-3.4	-6.7	1.7	1.9	60.2	Baa2	BBB+	BBB
13	South Africa	6,667	1.6	5.9	-0.8	-5.4	3.1	5.6	72.7	Ba2	BB-	BB-
14	Brazil	8,936	3.4	4.8	-1.1	-5.6	2.2	1.7	74.4	Ba2	BB-	BB-
15	Colombia	6,239	-0.3	10.5	-1.7	-2.6	3.4	1.3	61.3	Baa2	BB+	BB+
16	Turkey	10,655	5.9	61.4	-1.4	-0.8	0.6	-40.8	34.0	B3	B	B
17	Hungary	18,287	-0.4	9.9	1.0	-8.2	-22.4	-2.4	71.1	Baa2	BBB-	BBB

Sumber: CEIC, diolah Kemenko Perekonomian

Cat: data yang tersedia pada periode terakhir (diakses 3 Desember 2023). Warna hijau menandakan indikator semakin baik. Ranking tertinggi (dari 1 ke 17) dihitung dari rata-rata ranking negara untuk setiap indikator.

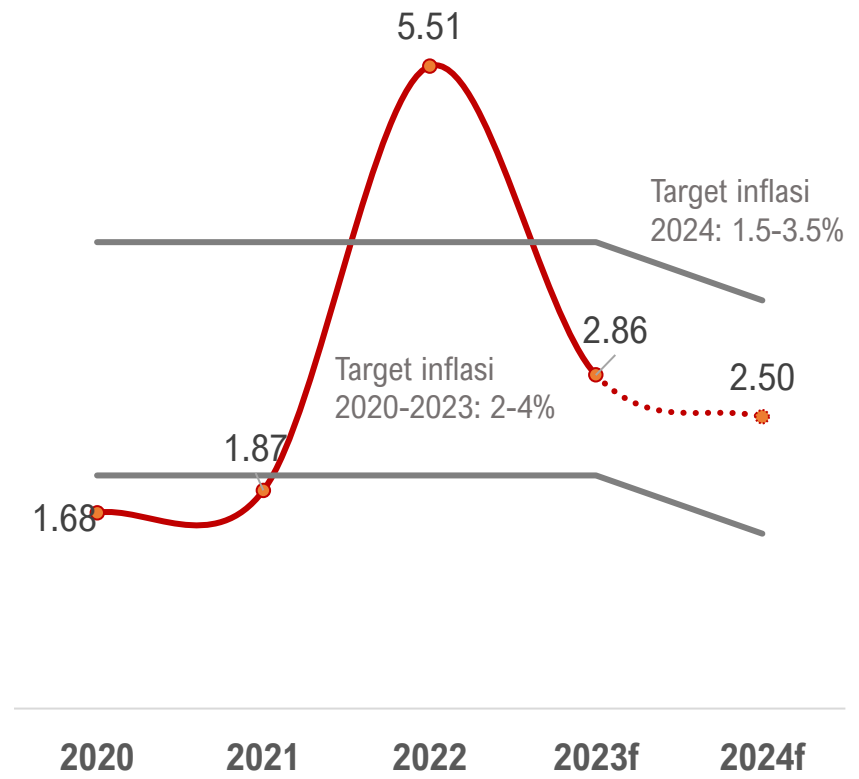
EKONOMI INDONESIA DIPROYEKSIKAN SOLID PADA TAHUN 2023-2024

Outlook PDB 2023 dan Target PDB 2024
(Persen, year-on-year)



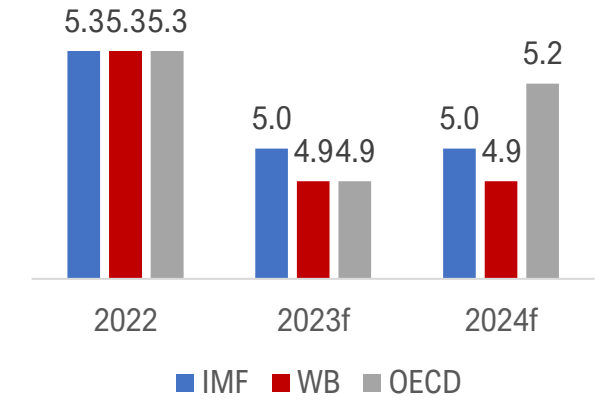
Sumber: Badan Pusat Statistik, APBN

Target Inflasi 2023-2024
(Persen, year-on-year)

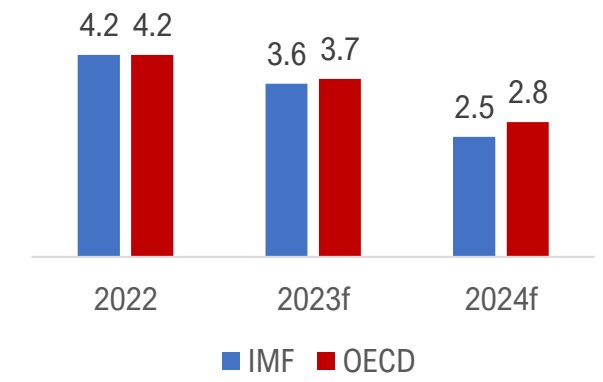


Sumber: Badan Pusat Statistik
Ket: Inflasi 2023 merupakan realisasi inflasi November

Proyeksi PDB Indonesia
(Persen, year-on-year)

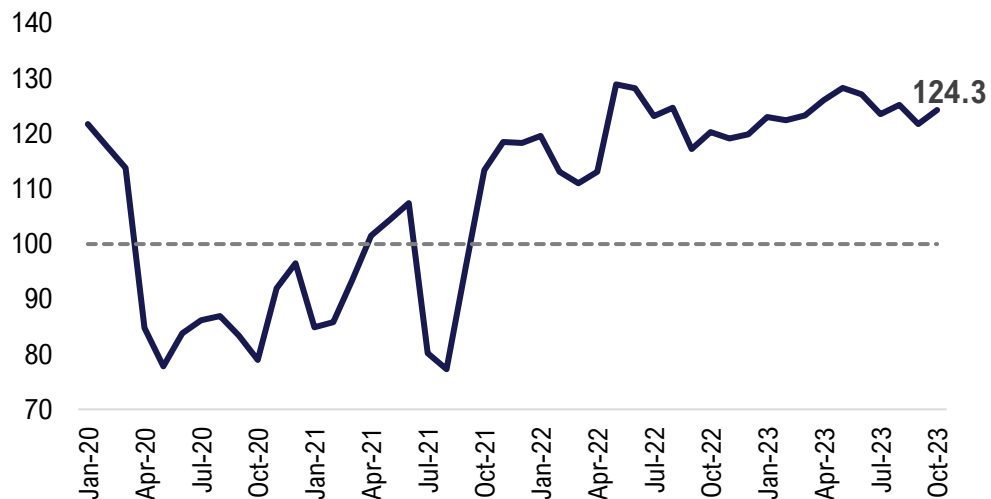


Proyeksi Inflasi Indonesia
(Persen, year-on-year)



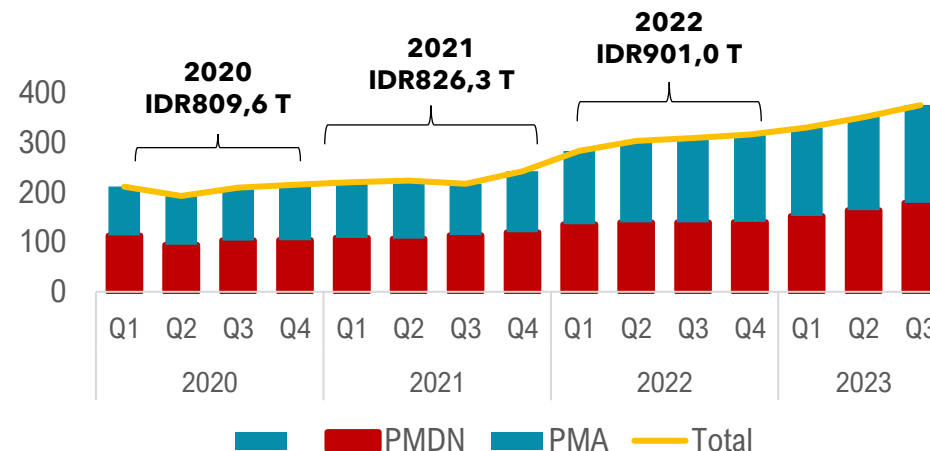
LEADING INDIKATOR MENUNJUKKAN PROSPEK YANG BAIK

Indeks Keyakinan Konsumen



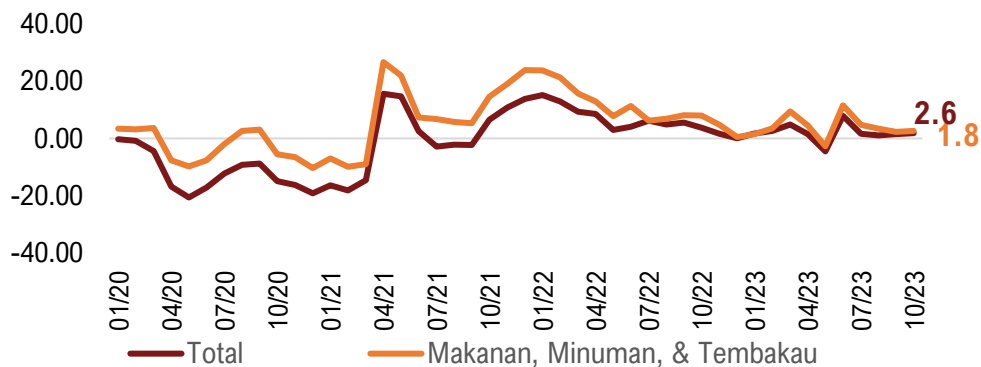
Sumber: Bank Indonesia

Total Investasi (Triliun Rupiah)



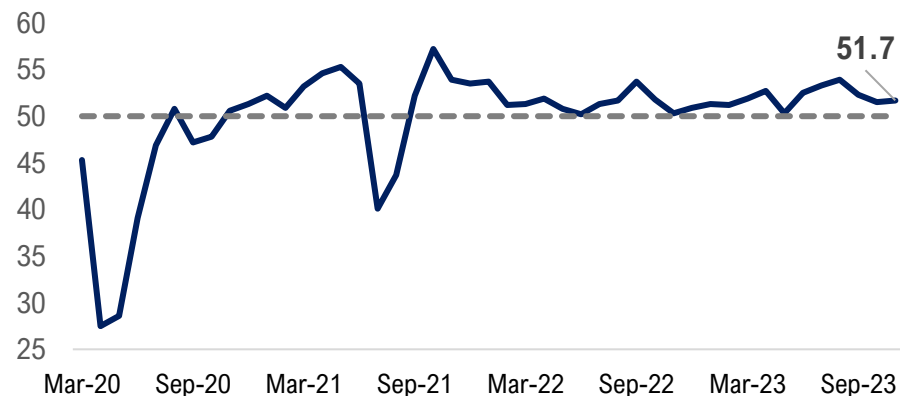
Sumber: BKPM

Indeks Penjualan Riil (persen, year-on-year)



Sumber: Bank Indonesia

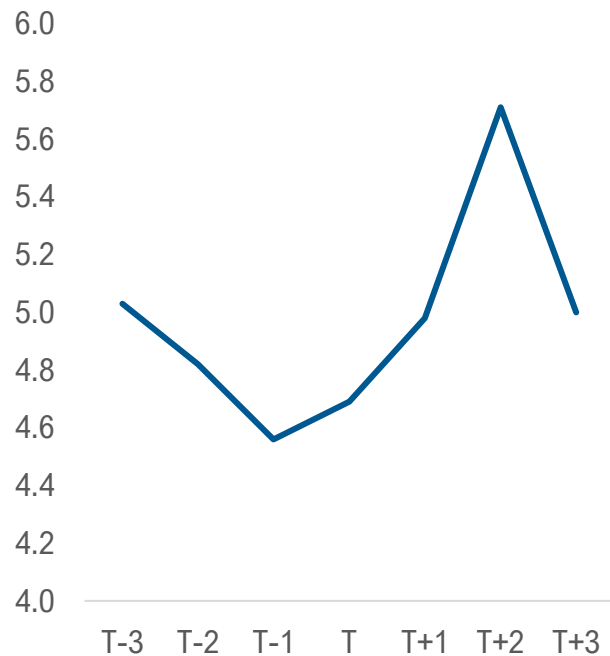
PMI Manufaktur



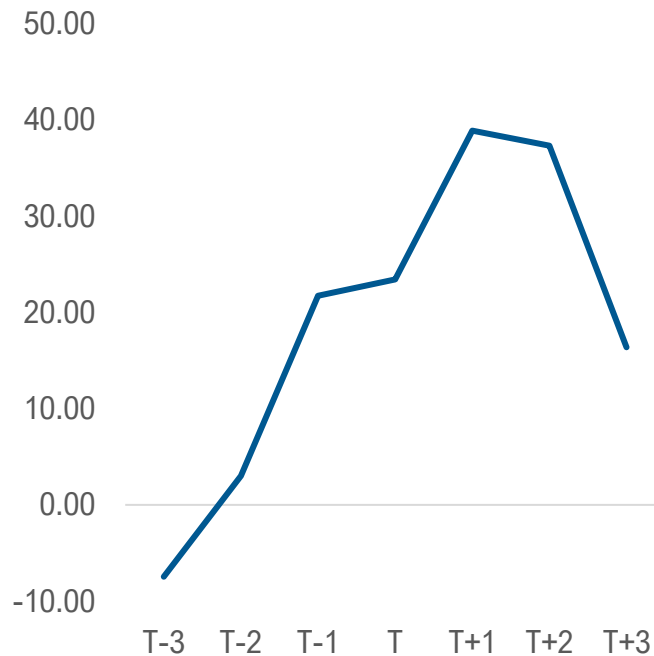
Sumber: S&P Global

SECARA HISTORIS PERIODE PEMILU BERPOTENSI MENDORONG PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI

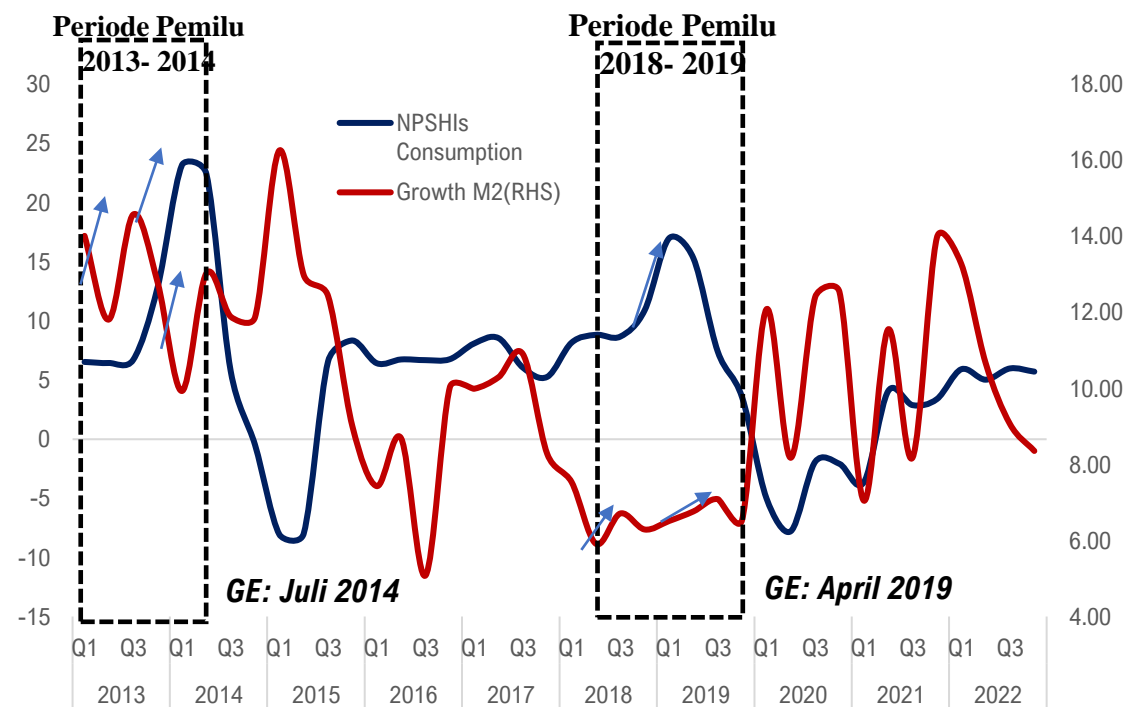
Pertumbuhan GDP Riil
(persen, year-on-year)



Return IHSG
(persen)



Konsumsi LNPRT dan M2 (money supply)
(persen)



Sumber: CEIC, diolah

Keterangan GDP riil dan Return IHSG: kuartal pemilu ditandai dengan 'T', dengan T-1 hingga T-3 menandakan tiga kuartal sebelum 'T' dan T+1 hingga T+3 menandakan tiga kuartal setelahnya. Data merupakan rata-rata dari 4 periode pemilu yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019

Sumber: BPS dan BI, diolah

STRATEGI KEBIJAKAN MENDUKUNG PENGUATAN EKONOMI

STRATEGI KEBIJAKAN Mendukung Penguatan Ekonomi Indonesia

- 1 Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Investasi**
 - Implementasi UU CK
 - Reformasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS)
- 2 Penguatan Daya Beli dan Pengendalian Inflasi**
 - Stabilisasi harga pangan
 - Menjaga daya beli melalui bantuan sosial
- 3 Penguatan Daya Saing dan Nilai Tambah Industri**
 - Revitalisasi sektor manufaktur “Making Indonesia 4.0”
 - Hilirisasi komoditas SDA
 - Penataan *National Logistics Ecosystem/NLE*
- 4 Mendorong Ekspor dan Menjaga Resiliensi Sektor Eksternal**
 - Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan daya saing komoditas ekspor
 - Perluasan Local Currency Transaction (LCT)
 - Implementasi PP DHE SDA

- 5 Pemberdayaan UMKM**
 - Kemudahan perizinan UMKM
 - Kemudahan akses pembiayaan diantaranya melalui KUR, UMi, Mekaar, dan LPDB.
 - Digitalisasi UMKM
- 6 Peningkatan Produktivitas SDM**
 - Program kartu Pra Kerja
 - Program pendidikan dan pelatihan vokasi
 - Percepatan literasi digital
- 7 Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas**
 - Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - Pembangunan IKN
- 8 Peningkatan Kerja Sama Internasional**
 - Tindaklanjut Deliverables G20
 - Tindaklanjut Deliverables ASEAN
 - Negosiasi IPEF

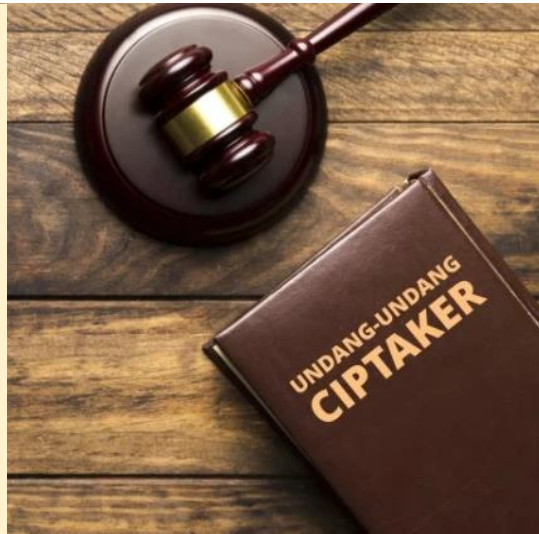


PERBAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR KEMUDAHAN BERUSAHA

1) Pengesahan UU Cipta Kerja

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja)

(31 Maret 2023)



2) PP 5/2021 terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Pemerintah mengimplementasikan OSS-RBA pada 9 Agustus 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Risiko Rendah

Risiko Sedang

Risiko Tinggi

Nomor Induk Berusaha (NIB) Terbit = 6,64 juta
Periode 4 Agustus 2021 - 3 Desember 2023

3) Daftar Prioritas Investasi

Kriteria Bidang Usaha Prioritas

Program/Proyek Strategis Nasional	Industri Pionir
Padat Modal	Orientasi Ekspor
Padat Karya	Orientasi dalam keg. penelitian, pengembangan, dan inovasi
Teknologi Tinggi	

Insentif Fiskal

- Insentif Perpajakan :
 - Tax Allowance
 - Tax Holiday
 - Investment Allowance
- Insentif kepabeanaan

Insentif Non Fiskal

- Kemudahan Perijinan Berusaha
- Penyediaan Infrastruktur pendukung
- Jaminan ketersediaan energi
- Jaminan ketersediaan bahan baku
- Keimigrasian
- Ketenagakerjaan
- Kemudahan lainnya sesuai UU

4) Lembaga Pengelola Investasi / INA



Perpres No. 10/2021
Bidang Usaha Penanaman Modal
246 Bidang Usaha

BAURAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4K PENGENDALIAN INFLASI

Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 merupakan hasil koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak di pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga. Kedepan **bauran kebijakan dan strategi 4K** masih menjadi kunci dalam **menjaga inflasi ditengah target inflasi yang menurun**.



KEBIJAKAN MONETER

Dukungan kebijakan moneter *pro-stability* dan *pro growth*

- Stabilitas nilai tukar Rupiah
- Kebijakan makroprudensial, digitalisasi SP, pendalaman pasar uang, dan pengembangan inklusi ekonomi-keuangan



KEBIJAKAN FISKAL

Optimalisasi APBN dan APBD sebagai *shock absorber*

- Subsidi dan Kompensasi Energi
- Anggaran Ketahanan Pangan termasuk optimalisasi CBP
- Optimalisasi APBD dan BTT
- Program Perlinsos, a.l bantuan pangan, BLT EL Nino (2023)
- Alokasi IF pengendalian inflasi daerah



Konsistensi



Inovasi

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

K1

Keterjangkauan Harga



Peningkatan Operasi Pasar/Bazar Pangan/program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

K2

Ketersediaan Pasokan



Peningkatan produksi, Melalui inovasi budidaya, pengembangan KSP, maupun program tanam pekarangan/ urban farming



Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

K3

Kelancaran Distribusi



Fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke defisit (termasuk optimalisasi tol laut dan jembatan udara)



Penguatan dan perluasan kerja sama antar daerah

K4

Komunikasi Efektif



Pemantauan dan Penguatan Data Secara Detail



Komunikasi Upaya Pengendalian Inflasi



INFLASI 2023 TERJAGA SESUAI SASARAN



INFLASI IHK
2% s.d 4%

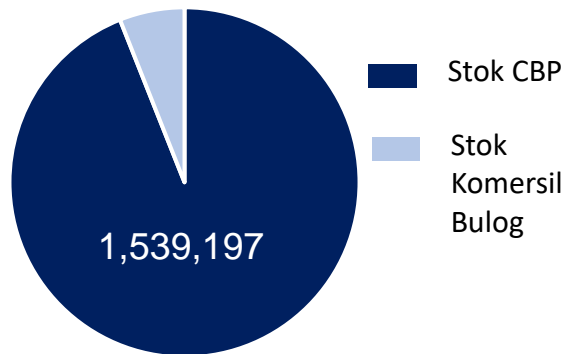
TARGET INFLASI 2024

INFLASI IHK
1,5% s.d 2,5%

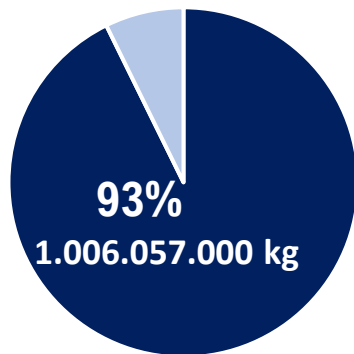
- Inflasi inti terjaga
- Inflasi VF terkendali dalam kisaran 3,0 s.d 5,0%
- Inflasi AP terjaga

OPTIMALISASI PELAKSANAAN INTERVENSI PASAR, MENAHAN KENAIKAN HARGA PANGAN LEBIH LANJUT

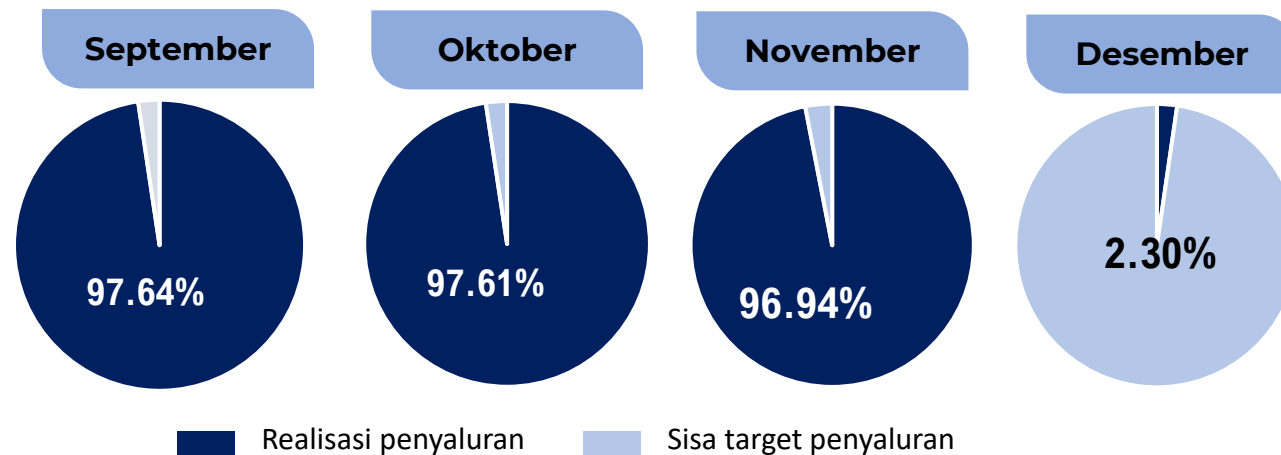
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 01 Des 2023



Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen (s.d 03 Des)



Penyaluran Bantuan Pangan Beras (s.d 04 Desember)



*Stok Beras yg dikelola BULOG : 1.575.000 Ton

*Target SPHP 2023 sebanyak 1,085 juta ton

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah



585 Lokasi di **35** Provinsi
998 Lokasi di **317** kab/kota

Sumber: Badan Pangan Nasional, Update 2 Desember 2023



Optimalisasi Operasi Pasar Murah



447 daerah melaporkan melaksanakan operasi pasar murah

Sumber: Kemendagri, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 23 Oktober 2023

KEBIJAKAN MENJAGA DAYA BELI → PENEBALAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MITIGASI EL NINO

STRATEGI KEBIJAKAN

1

TAMBAHAN BANTUAN BERAS 2023

- **Sasaran:** 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako)
- **Manfaat:** 10kg/KPM
- **Durasi:** 1 bulan (Desember 2023)
- **Penyelenggara:** Bapanas
- **Kebutuhan Anggaran:** Rp2,67 T
- **Catatan:** pada periode Maret-Mei dan Sept-Nov 2023 telah disalurkan bantuan beras dengan anggaran Rp15,9 T

TAMBAHAN BANTUAN BERAS 2024

- **Sasaran:** 22 juta KPM
- **Manfaat:** 10kg/KPM
- **Durasi:** 6 bulan (periode Jan-Maret dan April-Juni 2024)
- **Penyelenggara:** Bapanas

2

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) EL NINO

- **Sasaran:** 18,8 juta KPM penerima sembako
- **Manfaat:** Rp200 ribu/bulan
- **Durasi:** 2 bulan (Nov-Des 2023)
- **Penyelenggara:** Kemensos
- **Kebutuhan Anggaran BLT El Nino (Nov-Des):** Rp7,52 T

STIMULUS FISKAL SEKTOR PERUMAHAN 2023-2024

STRATEGI KEBIJAKAN

1

RUMAH KOMERSIAL

- ❑ **Pemberian PPN DTP rumah harga sampai dengan Rp5 M, namun yang ditanggung pemerintah s.d Rp2 M selama 14 bulan (Nov'23-Des'24)**
 - 2023 → Nov-Des: PPN DTP 100%
 - 2024 → Sem I: PPN DTP 100% → Sem II: PPN DTP 50%
 - Total anggaran 2023-2024 sebesar Rp3,38 T

2

RUMAH MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH/MBR

- ❑ **Pemberian Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan**
 - 2023 → Nov-Des: sebesar Rp4 juta per rumah
 - 2024 → Jan-Des: sebesar Rp4 juta per rumah
 - Total anggaran 2023-2024 sebesar Rp1,2 T
- ❑ **Kenaikan harga rumah MBR (bersubsidi) yang memperoleh pembebasan PPN menjadi Rp350 juta (rumah tapak dan Rusun)**

3

RUMAH MASYARAKAT MISKIN

- ❑ **Penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST)**
 - Sebanyak 1,8 ribu rumah selama periode Nov-Des 2023
 - Bantuan RST sebesar Rp20 juta per rumah
 - Total anggaran 2023 sebesar Rp36,2 M

HILIRISASI KOMODITAS SDA MENINGKATKAN NILAI TAMBAH EKONOMI

HILIRISASI INDUSTRI LOGAM

HILIRISASI BAHAN GALIAN NON LOGAM

HILIRISASI PETROKIMIA

HILIRISASI BATUBARA

JUMLAH DAN INVESTASI SMELTER 2021-2024

Komoditas	Jumlah Smelter			Total Investasi (Juta USD)	Realisasi Investasi (Juta USD)	Ekspor 2014 (Juta USD)	Ekspor 2022 (Juta USD)
	Ada	Rencana	Total				
Nikel	11	19	30	7619,3	5508,4	1.058,1	5.227,5
Bauksit	4	8	12	7138,9	2979,5	664,5	837,0
Besi	1	1	2	53,7	47,2	1.148,1	25.499,6
Tembaga	2	2	4	4693,3	1046,9	1.967,4	2.571,9
Mangan	1	1	2	23,9	12,5		
Timah dan Seng	0	2	2	28,8	22,0	20,2	52,8

NILAI TAMBAH BAUKSIT



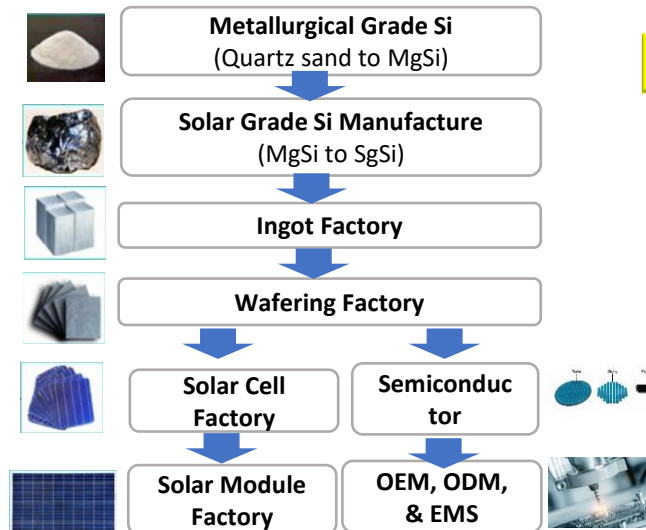
NILAI TAMBAH TIMAH



NILAI TAMBAH NIKEL

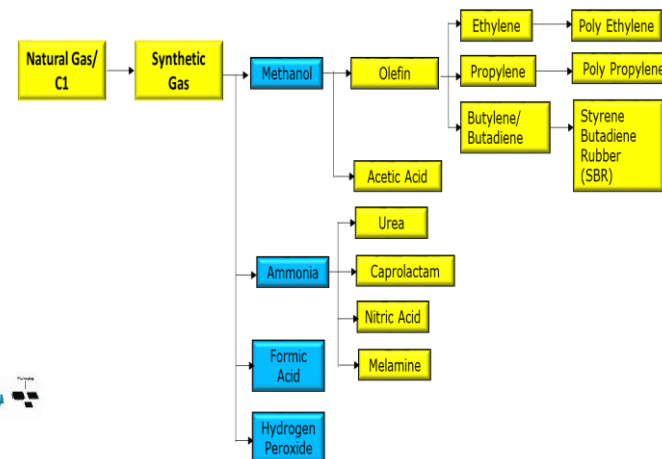


PASIR SILIKA



1.875.610 m³ Realisasi Penambangan Pasir Silika/Kuarsa (2020)

GAS ALAM



Hilirisasi industri petrokimia dianggap sebagai sektor strategis karena menghasilkan bahan baku utama misalnya: metanol, dan amonia untuk mendukung produsen hilir.



Pemerintah mendorong hilirisasi batubara melalui coal to DME sebagai upaya substitusi LPG

Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam Membutuhkan Total Investasi Sebesar USD 545,3 Miliar

BERBAGAI INSENTIF FISKAL UNTUK MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI & SDM

UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (dan perubahannya)



1

Tax Holiday

Fasilitas pengurangan PPh terutang dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada industri pionir.

2

Super Deduction untuk Kegiatan Litbang (RnD)

Fasilitas super deduction sebesar 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

3

Super Deduction untuk Vokasi

Fasilitas super deduction sebesar 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

4

Investment Allowance

Fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva berwujud yang diberikan kepada industry padat karya.

5

Tax Allowance

Fasilitas kepada penanaman modal tertentu dan/atau di daerah tertentu berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30%, amortisasi/depresiasi dipercepat, tambahan periode kompensasi kerugian, dan pengenaan PPh atas dividen sebesar 10% atau lebih rendah dgn tax treaty.

STRATEGI MENDORONG EKSPOR DAN MENINGKATKAN RESILIENSI SEKTOR EKSTERNAL

Menjaga Ketahanan Sektor Eksternal

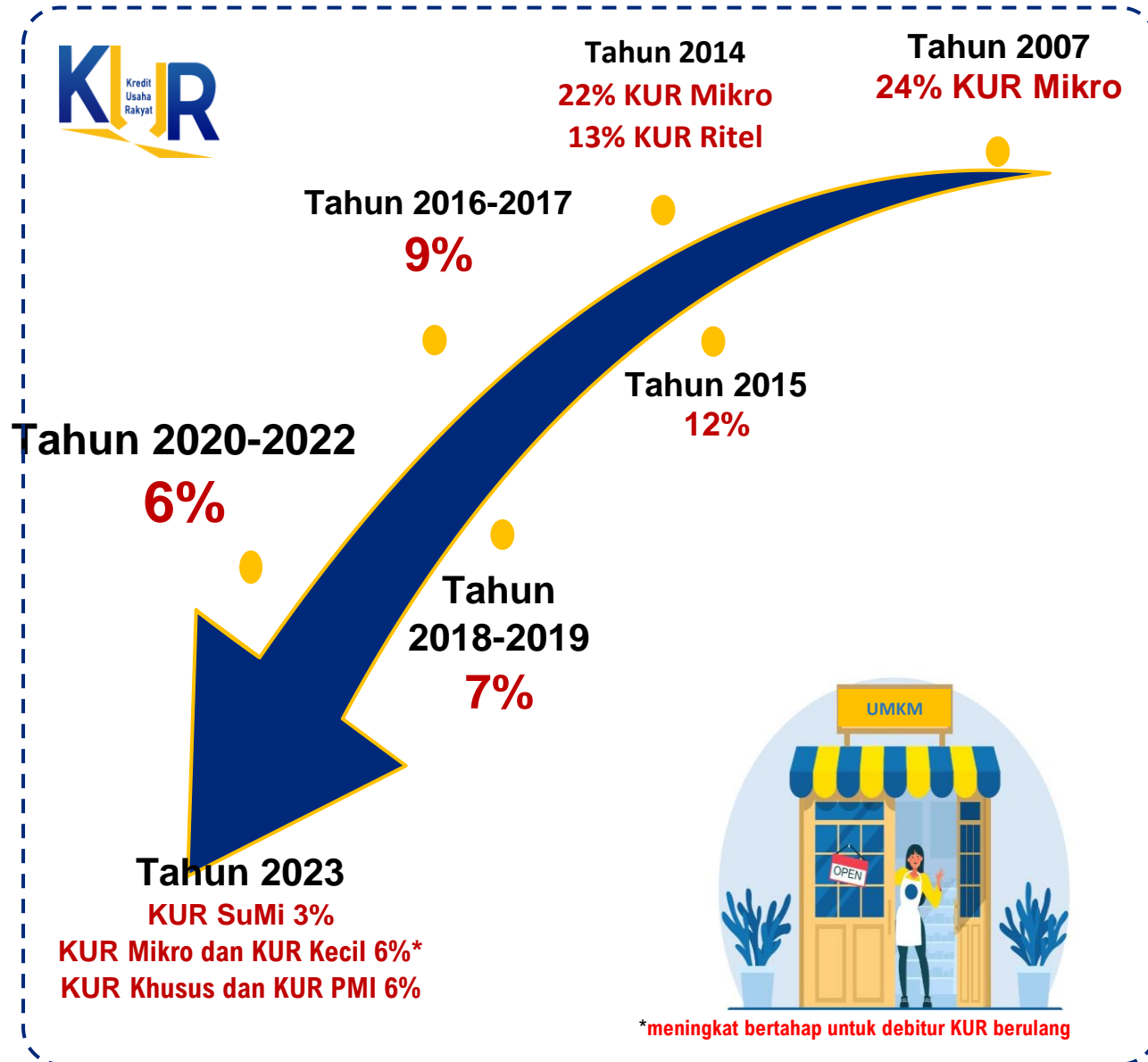
Keppres 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional
Untuk menjamin keberlangsungan kinerja ekspor melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan ekspor UMKM.

PP 36/2023 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA
Sebagai penyangga peningkatan likuiditas valas dan pendalaman pasar keuangan melalui penciptaan berbagai instrumen valas.

Perluasan implementasi LCT
Mengurangi ketergantungan pada satu mata uang tertentu, memfasilitasi transaksi perdagangan bilateral bagi negara-negara, meningkatkan ketahanan sektor eksternal.



AKSELERASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Suku Bunga KUR rendah.

Syarat agunan tambahan KUR juga mudah.

- KUR kecil dan KUR khusus di atas Rp100 juta sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.
- Agunan tambahan **tidak diperlukan** bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR khusus s.d. Rp100 juta, dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BERBAGAI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SDM

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Perpres No 68 Tahun 2022)

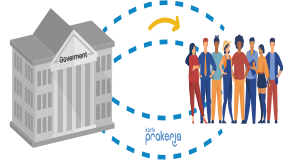


Peningkatan Tata Kelola TVET
Reformasi Penyelenggaraan TVET
Peningkatan Peran DUDI dalam TVET

Program Kartu Pra Kerja



“Program G2P (Government to Person) yang paling masif di Indonesia”



Digitalisasi UMKM

Inovasi dan teknologi Literasi dan Pengembangan SDM Legalitas dan Perijinan



#PahlawanDigital



Pembiayaan dan Pemasaran



Standarisasi dan Sertifikasi



Pengurusan Ijin BPOM secara online melalui : e-reg.pom.go.id



Pengurusan Sertifikasi Halal secara online melalui : <https://ptsp.halal.go.id>



Registrasi SNI secara online melalui : SIMPKTN

Percepatan Dan Pemerataan Infrastruktur Digital



Palapa Ring



BTS



Akses Internet



Ekosistem Digital TIK



Satelit

PENCAPAIAN SEKTOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL YANG JUGA MELINGKUPI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PSN

170 proyek Selesai
Est. Rp 1.299,41 T

30 proyek + 9
Program Beroperasi
Sebagian

61 Proyek Tahap
Konstruksi

4 Proyek Tahap
Transaksi

46 Proyek +3
Program Tahap
Penyiapan

Infrastruktur Penunjang Konektivitas



Penguatan poros maritim

- Beroperasinya 24 pelabuhan laut baru
- Peningkatan pelayanan 60 pelabuhan penyeberang



Penguatan infrastruktur udara

- Beroperasinya 13 pelabuhan udara baru
- Pembangunan fasilitas *air cargo* di 6 lokasi



Peningkatan efisiensi angkutan jalan

- Pembangunan ~2.760,1 km jalan tol baru
- Pembangunan 2,650 km jalan baru

Infrastruktur Kedaulatan Pangan & Mitigasi Bencana



Implementasi Program Pemerataan Ekonomi

- Telah diterbitkan Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi



Peningkatan kapasitas Infrastruktur Sumber Daya Air

- Telah selesai konstruksi 39 Bendungan PSN menambah persediaan air baku sebesar 18 m3/dtk, suplai air irigasi seluas 255.732 Ha, mereduksi potensi banjir sebesar 7.777,28 m3/dtk, dan potensi pengembangan tenaga listrik sebesar 149 MW
- Terbangunnya jaringan irigasi untuk pengairan sawah seluas 1.661 ha

Infrastruktur Ketahanan Energi



Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Kelistrikan

- Beroperasinya 17,6 GW pembangkit listrik baru
- Tersambungunya Jaringan Transmisi sepanjang 1.172 km



Peningkatan Suplai Hulu Migas

- Meningkatnya potensi produksi gas bumi sebesar 23,3 MTPA atau 3,3 BCFD.

Infrastruktur Hilirisasi Industri & Penunjang Investasi



Akselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis

- Pengembangan 20 Kawasan Ekonomi Khusus, dengan realisasi investasi Rp 139,9 Triliun
- Beroperasinya 10 Kawasan Industri Strategis



Penguatan Nilai Tambah Industri melalui Program Smelter

- Beroperasinya 8 Smelter untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas nikel, bauksit, dan tembaga

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN IKN DALAM RENCANA INDUK



I. 2022-2024

Pemindahan tahap awal

Infrastruktur dasar yang utama **selesai dibangun dan beroperasi** (infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, pengelolaan persampahan, dan air limbah) untuk penduduk pionir

Membangun **sarana utama** (mis. Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan) di KIPP

Pemindahan ASN tahap awal (termasuk TNI, Polri)

Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas

II. 2025-2029

Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh

Fasilitas **transportasi umum** baik primer maupun sekunder **sudah dapat digunakan**

Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri dan perkantoran pemerintahan pusat

Proses **pemindahan ASN** diperkirakan **dapat diselesaikan**

Pengembangan **riset dan talenta** serta universitas unggulan

Pembangunan **lanjutan** dan **pemeliharaan** infrastruktur dasar

III. 2030-2034

Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif

Pengembangan utilitas terintegrasi serta KA akses Bandara Balikpapan-KIPP

Pemindahan lanjutan **personel TNI/Polri**

Pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam kluster ekonomi superhub

Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad ke-21

Peningkatan investasi dan **kapasitas produksi** kluster ekonomi

IV. 2035-2039

Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan

Perkembangan pesat di bidang pendidikan, dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi

Peningkatan kapasitas dan diversifikasi kluster ekonomi dan infrastruktur pemampu di Daerah Mitra

V. 2040-2045

Mengokohkan reputasi sebagai **"Kota Dunia untuk Semua"**

Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA di IKN dan Daerah Mitra sekitarnya

Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi

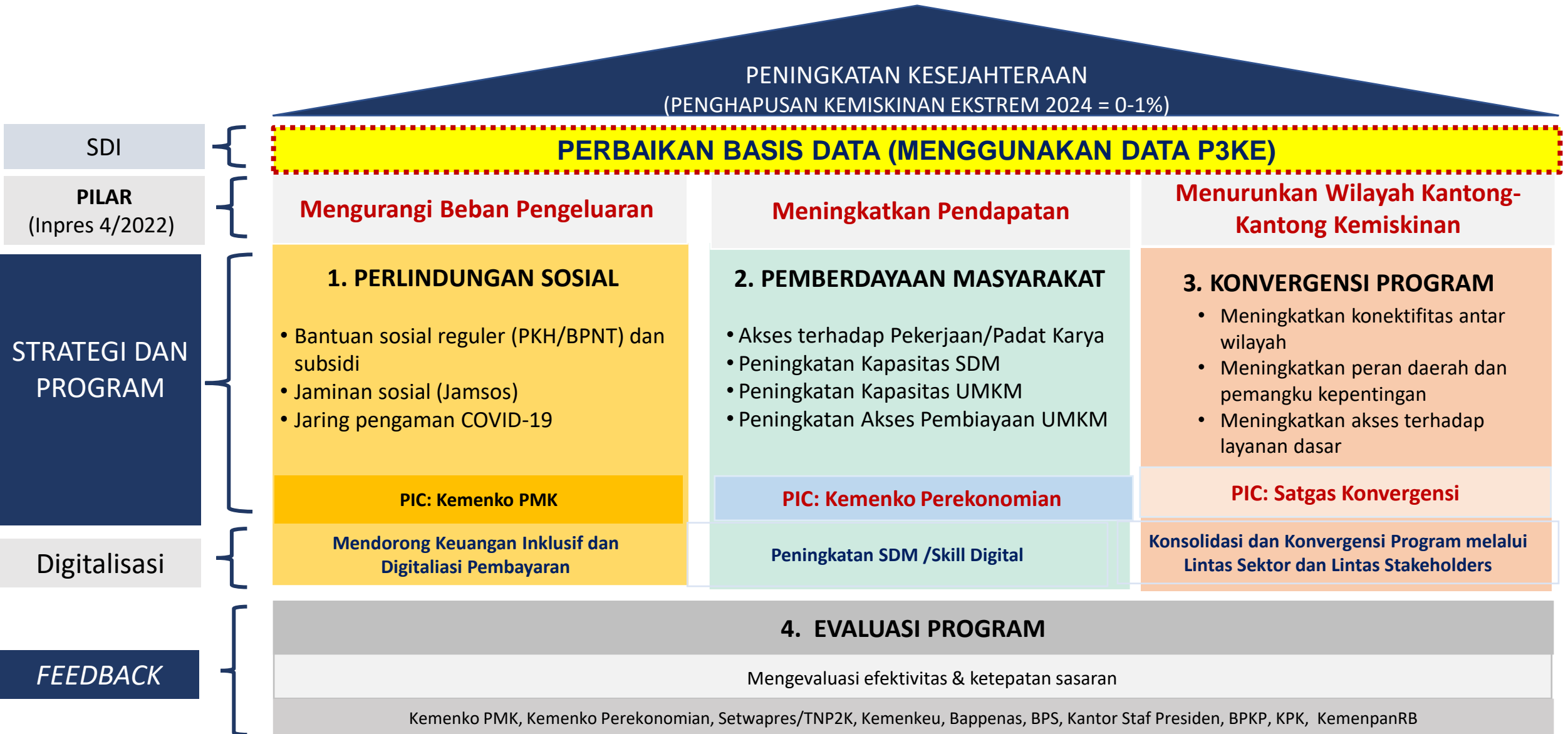
Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN

Mencapai **net zero-carbon emission** dan **100% energi terbarukan**

Pengembangan industri berkelanjutan

Menjadi **kota terdepan** di dunia dalam hal daya saing

STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM



ARAHAN PRESIDEN UNTUK MENDORONG KETERLIBATAN DUNIA USAHA DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Libatkan sektor swasta untuk berperan sebagai *off taker* produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan
- Arahan Presiden Dalam Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis (21 Juli 2021)

Dalam *collaborative working* ini, selain koordinasi antara K/L dan dengan pemda, penting juga untuk melibatkan dunia usaha agar berbagai program *Corporate Social Responsibility (CSR)* mereka terintegrasi dengan prioritas pemerintah.
- Arahan Wapres Ma'ruf Amin, 25 Agustus 2021

Tidak boleh ada kemiskinan ekstrem di daerah dimana Industri berada, termasuk Kawasan Industri. Pengentasan kemiskinan ekstrem mengoptimalkan CSR.
- Arahan Menko Perekonomian, 18 Maret 2021

Penyediaan Listrik Bagi Masyarakat Miskin



- Bagi masyarakat miskin di daerah *off grid*
- Pemberian *Solar Home System* disertai pembangunan infrastruktur sosial dan pemberdayaan masyarakat
- **Daerah sasaran:** Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTT); Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Maluku)
- **Pendukung Program:** Signify (Phillips Lighting), LazisMu, Gotong Royong Fund, Kopernik, Yayasan Besi Pae

Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)



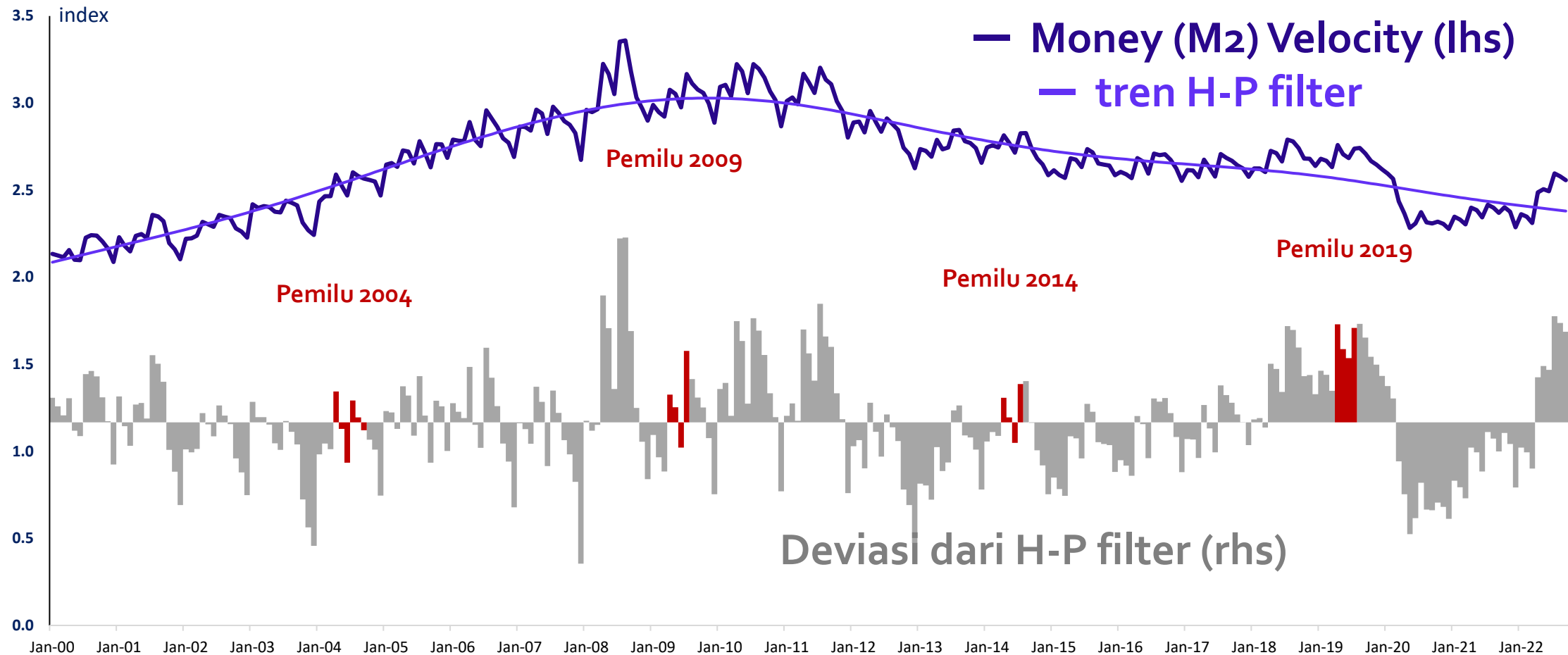
- Mendorong konvergensi program pemerintah dengan program CSR dunia usaha
- Konvergensi melalui menu intervensi dan lokasi prioritas yang sama dengan program pemerintah
- **Daerah sasaran:** Kab. Kapuas Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Cianjur, Kab. Nunukan, Kab. Bolsel, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Bojonegoro, Kab. Maros, dst.
- **Pendukung Program:** Sinar Mas, Yayasan Hadji Kalla, SKK Migas, PTTEP Migas, Mitra Bara Adiperkasa, J-Resources, Exxon Mobile, Budha Tzu Chi, LazisMu, Kopernik, Save the Children, Indonesia Heritage Foundation, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana



TERIMA KASIH



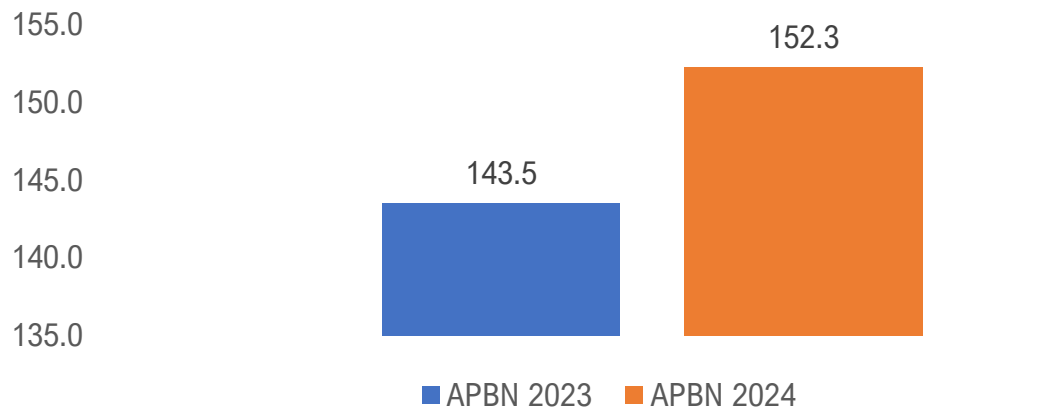
MONEY VELOCITY (PERPUTARAN UANG) CENDERUNG MENINGKAT ($\pm 1,2\%$) SELAMA MASA PEMILU



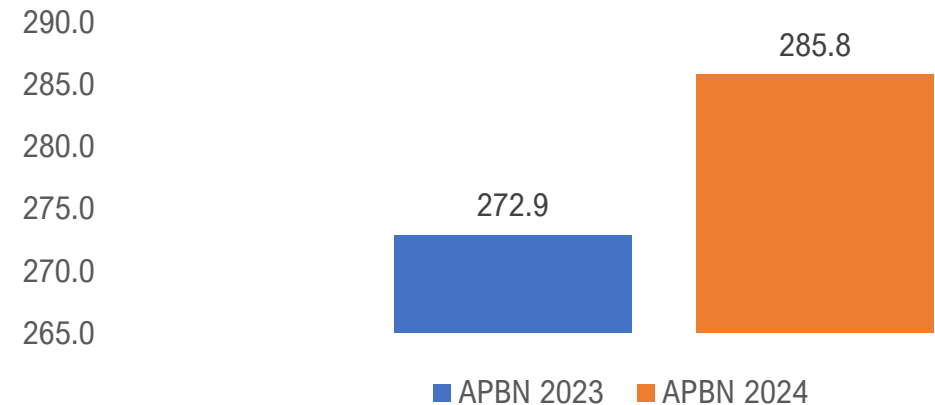
Sumber: BI, BPS, calculations by BCA Economist

Peningkatan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai dapat Mendorong Daya Beli Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial (dalam Triliun Rupiah)

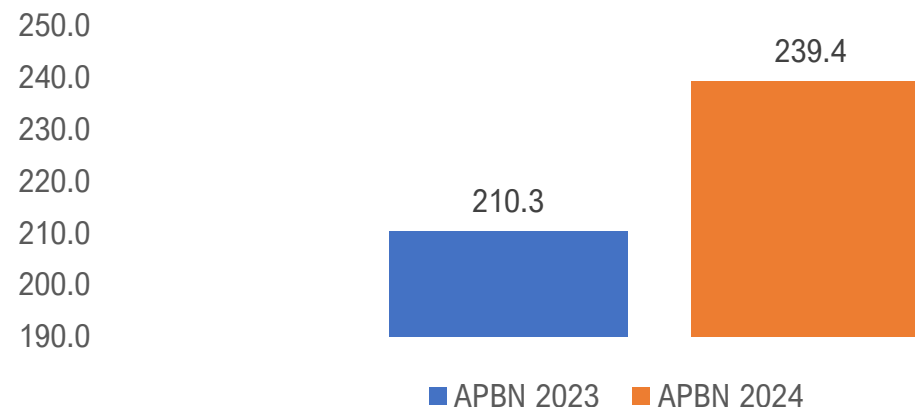


Belanja Pegawai (dalam Triliun Rupiah)



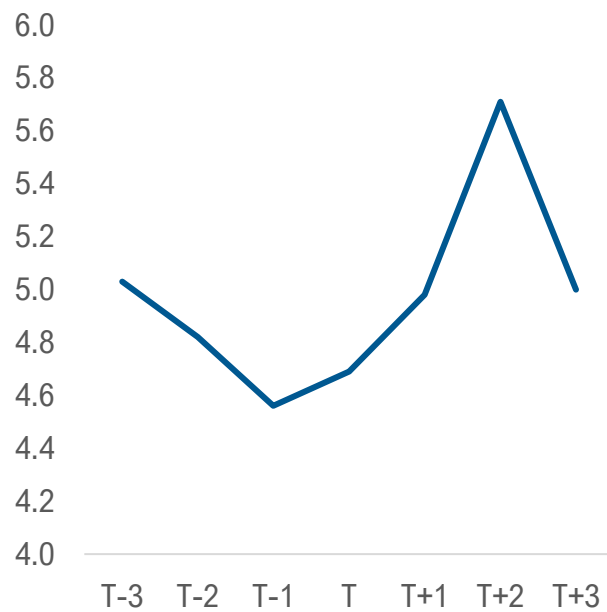
Peningkatan Belanja Modal Pemerintah dapat Meningkatkan Investasi Publik

Belanja Modal (dalam Triliun Rupiah)

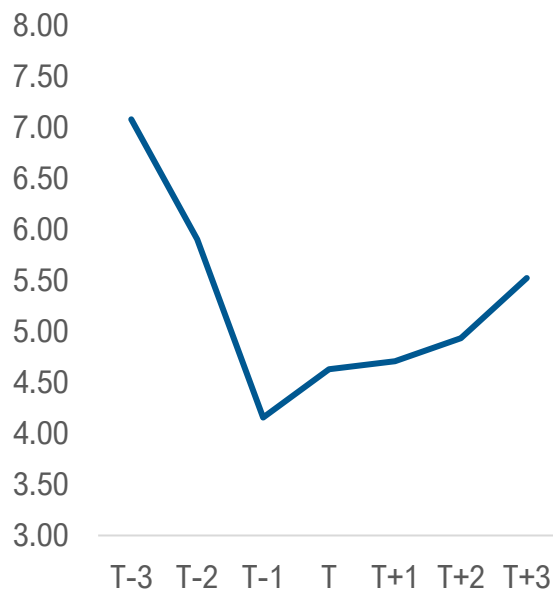


SECARA HISTORIS, PEMILU BERPOTENSI MENDORONG PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI

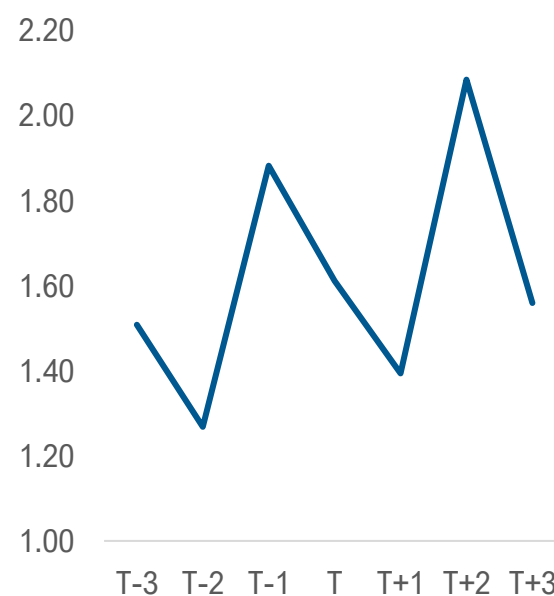
Pertumbuhan GDP Riil
(persen, year-on-year)



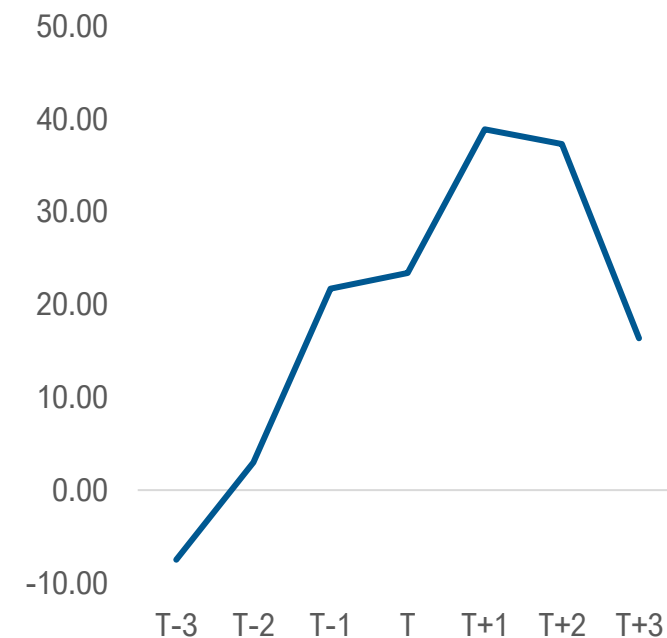
Tingkat Inflasi
(persen, year-on-year)



Porsi FDI terhadap PDB
(persen)



Return IHSG
(persen)

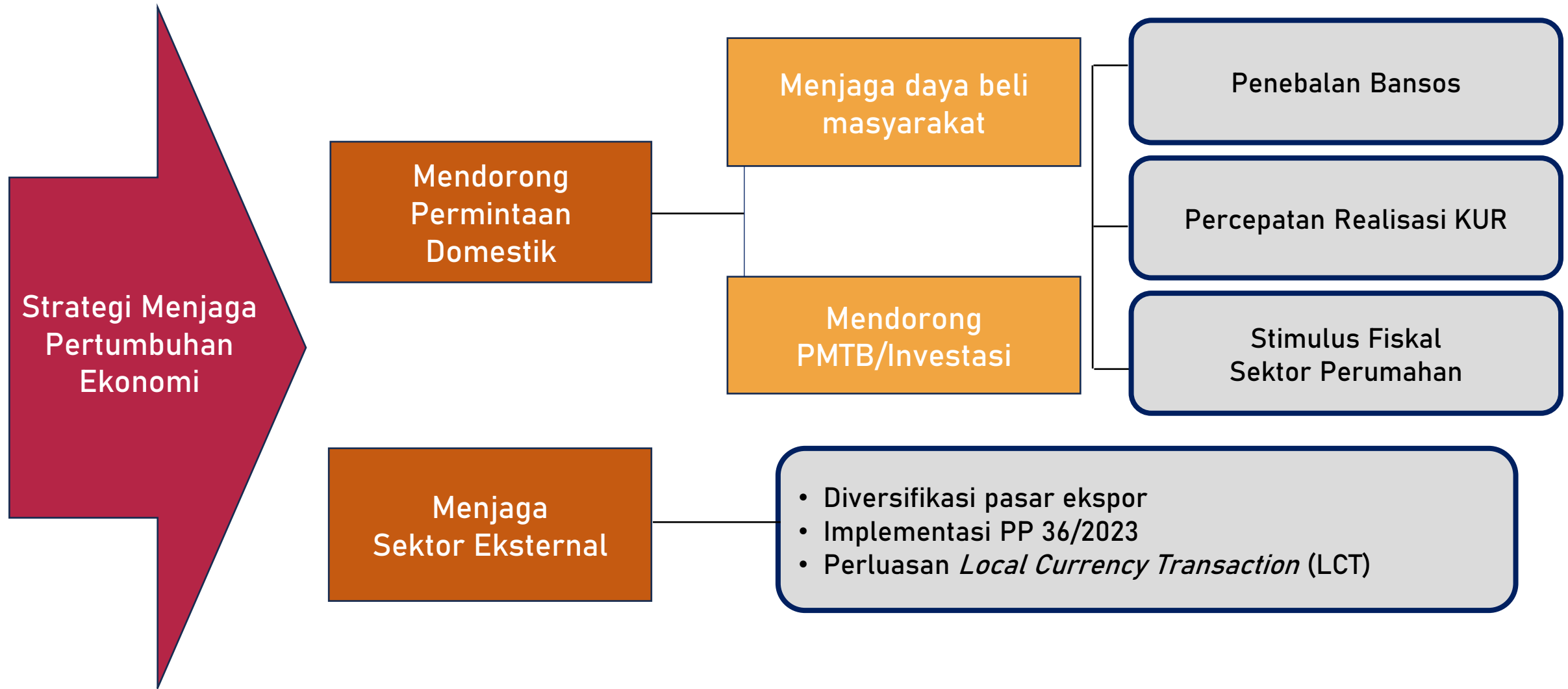


Sumber: CEIC, diolah

Cat: kuartal pemilu ditandai dengan 'T', dengan T-1 hingga T-3 menandakan tiga kuartal sebelum 'T' dan T+1 hingga T+3 menandakan tiga kuartal setelahnya. Data merupakan rata-rata dari 4 periode pemilu yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019

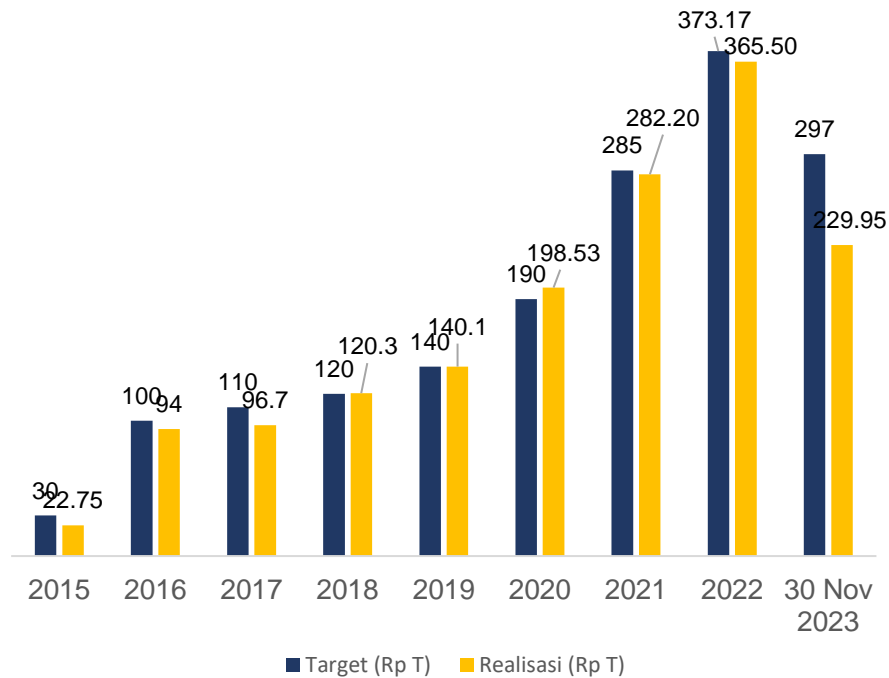


STIMULUS FISKAL JANGKA PENDEK: MEMITIGASI RISIKO GLOBAL DAN MENDORONG EKONOMI NASIONAL

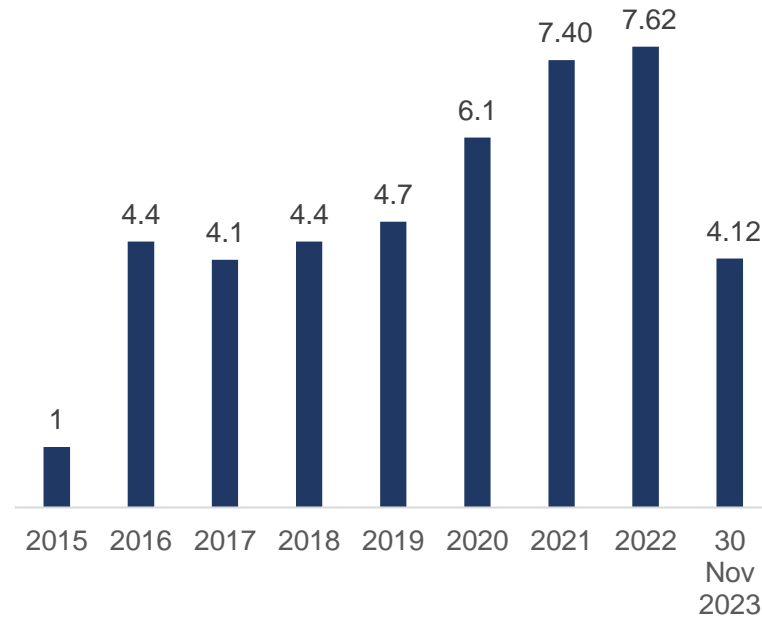


PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENCAPAI 73,5% DARI TARGET RP297 TRILIUN

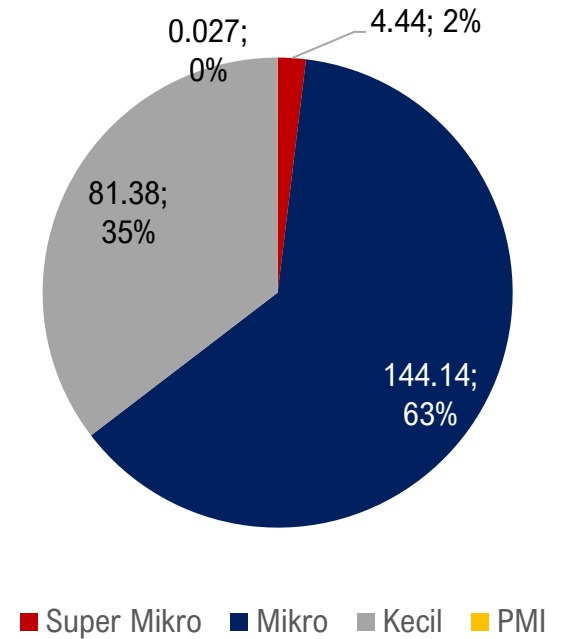
Target dan Realisasi KUR
(triliun Rupiah, per 30 November 2023)



Debitur KUR
(juta orang, per 30 November 2023)



Jenis KUR
(triliun Rupiah; persen)



Sumber: Data Komite Kebijakan Jan'22 s.d. April 2023, data SIKP 30 November 2023
NPL posisi 30 November 2023, data Komite Kebijakan

MANFAAT LOCAL CURRENCY TRANSACTION (LCT) BAGI PELAKU USAHA EKSPOR

1 Fleksibilitas ketentuan seperti **threshold (Jual-Beli) transaksi tanpa dokumen underlying yang lebih longgar** dibandingkan transaksi USD/IDR

	USD/IDR	MYR/IDR	THB/IDR	JPY/IDR	CNY/IDR
Spot	\$100,000 per bulan*	\$200,000 per transaksi	\$200,000 per transaksi	\$500,000 per transaksi	-
Derivatif	\$100,000 per bulan*	\$200,000 per transaksi	\$200,000 per transaksi	\$500,000 per transaksi	-

*) Khusus Pembelian Valas

2 Nasabah **dapat membuka rekening mata uang lokal mitra** di Indonesia dan Negara Mitra

3 Nasabah LCS **dapat melakukan remitansi dalam mata uang lokal** untuk penerimaan atau pengiriman gaji atau pendapatan

4 Nasabah dapat **memperoleh financing dalam mata uang lokal mitra** di Indonesia untuk kebutuhan setelmen ke negara mitra, misalnya membuka LC dalam MYR, THB, JPY, CNY, atau IDR

5 **Meningkatkan efisiensi transaksi** FX dan *Hedging* melalui *direct quotation*

6 **Potensi insentif LCS** (a.l. insentif kepabeanan dari Dirjen Bea Cukai)

7 **Faster fund transfer** (*Asian time zone*)

SEBARAN NASIONAL 20 KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

1. KEK Arun Lhokseumawe 

Aceh Utara & Lhokseumawe, Aceh (PP No. 5/2017 - Februari 2017)
Beroperasi Desember 2018
Kegiatan Utama:
- Industri Energi
- Industri Petrokimia dan Kimia Lainnya
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Industri Pengolahan Kayu
- Logistik

2. KEK Sei Mangkei 

Kab. Simalungun, Sumatera Utara (PP No. 29/2012 - Februari 2012)
Beroperasi Januari 2015
Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Industri Pengolahan Karet
- Pariwisata
- Logistik

3. KEK Batam Aero Technic 

Kota Batam, Kepulauan Riau (PP No. 67/2021 - Juni 2021)
Kegiatan Utama:
- Industri MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) Pesawat

4. KEK Nongsa 

Kota Batam, Kepulauan Riau (PP No. 68/2021 - Juni 2021)
Kegiatan Utama:
- IT-digital
- Pariwisata

5. KEK Galang Batang 

Kab. Bintan, Kepulauan Riau (PP No. 42/2017 - Oktober 2017)
Beroperasi Desember 2018
Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Bauksit
- Logistik

11. KEK Singhasari 

Kab. Malang, Jawa Timur (PP No. 68/2019 - September 2019)
Kegiatan Utama:
- Pariwisata
- Pengembangan Teknologi

12. KEK Sanur 

Denpasar, Bali (PP No. 41/2022 - November 2022)
Kegiatan Utama:
- Kesehatan
- Pariwisata

13. KEK Kura-Kura Bali 

Denpasar, Bali (PP No. 23/2023 - April 2023)
Kegiatan Utama:
- Pariwisata
- Industri Kreatif

14. KEK Mandalika 

Kab. Lombok Tengah, NTB (PP No. 52/2014 - Juni 2014)
Beroperasi Oktober 2017
Kegiatan Utama:
Pariwisata

15. KEK MBTK 


Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur (PP No. 85/2014 - Oktober 2014)
Beroperasi April 2019
Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Industri Energi
- Logistik

16. KEK Palu 


Kota Palu, Sulawesi Tengah (PP No. 31/2014 - Mei 2014)
Beroperasi September 2017
Kegiatan Utama:
- Industri Logam Dasar
- Logistik

17. KEK Likupang 


Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara (PP No. 84/2019 - Desember 2019)
Kegiatan Utama:
Pariwisata

18. KEK Bitung 

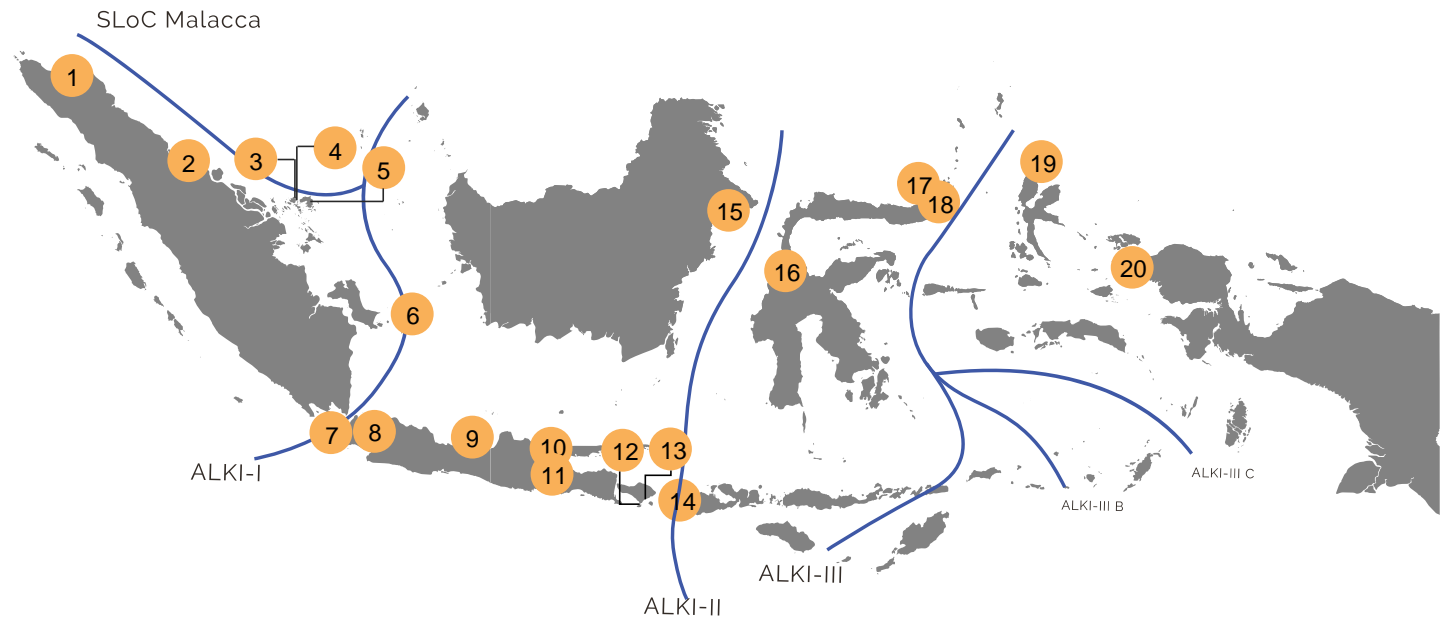
Kota Bitung, Sulawesi Utara (PP No. 32/2014 - Mei 2014)
Beroperasi April 2019
Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Kelapa
- Industri Pengolahan Perikanan
- Logistik

19. KEK Morotai 

Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara (PP No. 50/2014 - Juni 2014)
Beroperasi April 2019
Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Perikanan
- Pariwisata
- Logistik


20. KEK Sorong 

Kab. Sorong, Papua Barat Daya (PP No. 31/2016 - Agustus 2016)
Beroperasi Oktober 2019
Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Nikel
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Sagu)
- Logistik




8. KEK Lido 

Bogor, Jawa Barat (PP No. 69/2021 - Juni 2021)
Kegiatan Utama:
- Pariwisata
- Industri Kreatif

7. KEK Tanjung Lesung 

Kab. Pandeglang, Banten (PP No. 26/2012 - Februari 2012)
Beroperasi Februari 2015
Kegiatan Utama:
Pariwisata

6. KEK Tanjung Kelayang 

Kab. Belitung, Bangka Belitung (PP No. 6/2016 - Maret 2016)
Beroperasi Maret 2019
Kegiatan Utama:
Pariwisata

10. KEK Gresik 

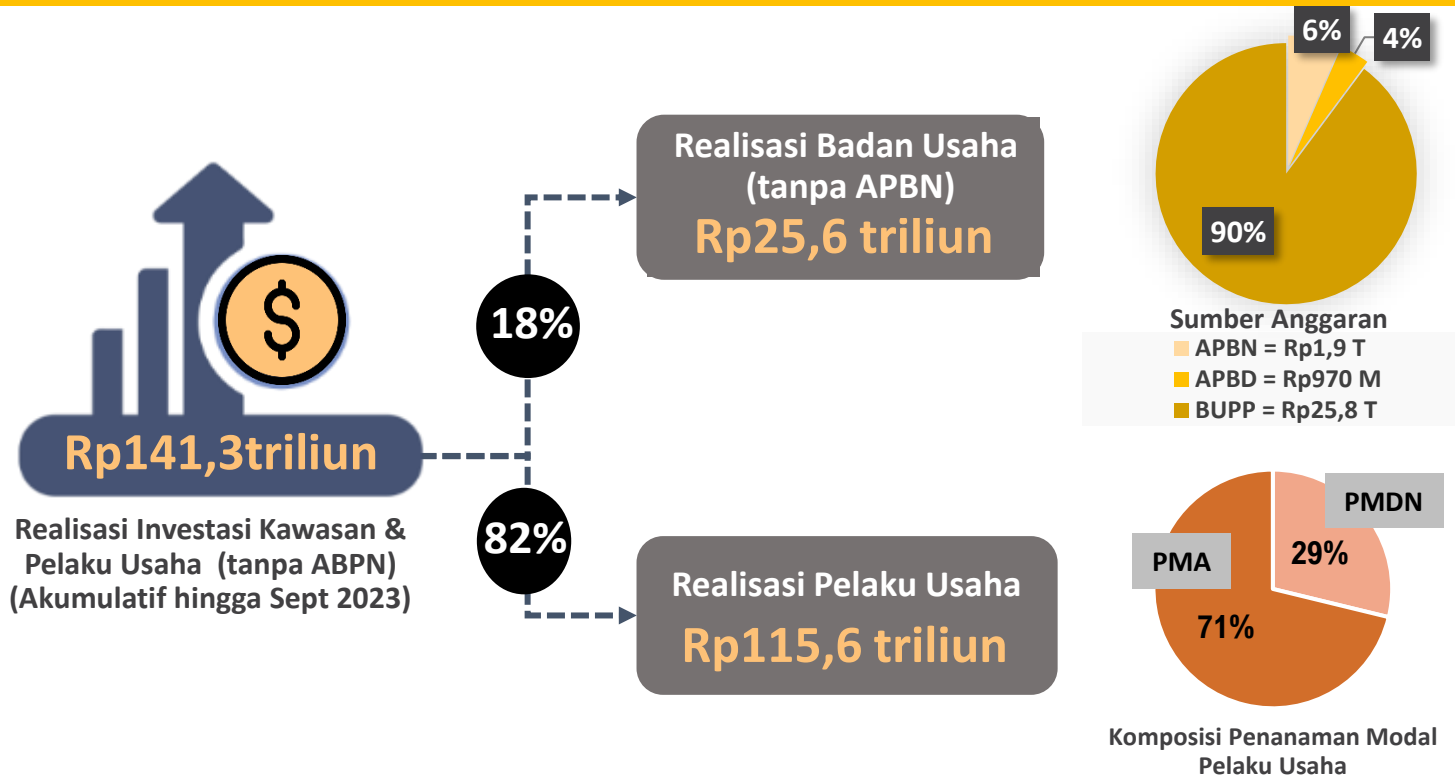
Kab. Gresik, Jawa Timur (PP No. 71/2021 - Juni 2021)
Kegiatan Utama:
- Industri Metal
- Industri Elektronik
- Industri Kimia
- Industri Energi
- Logistik

9. KEK Kendal 

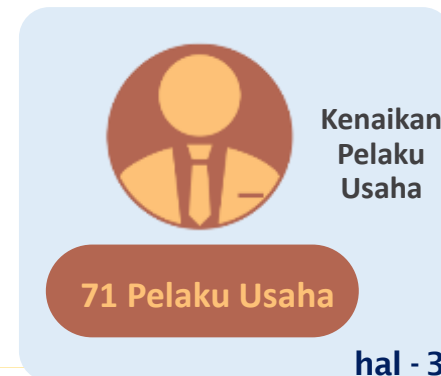
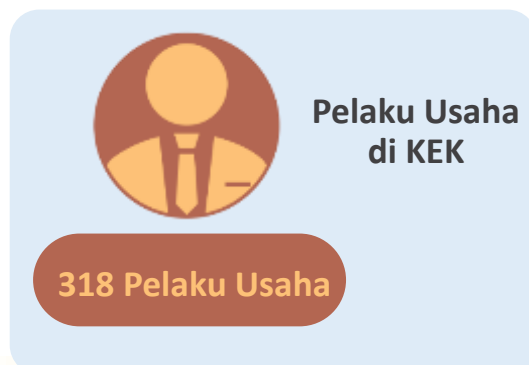
Kab. Kendal, Jawa Tengah (PP No. 85/2019 - Desember 2019)
Beroperasi Mei 2021
Kegiatan Utama:
- Industri Tekstil dan Busana
- Industri Furnitur dan Alat Permainan
- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Otomotif
- Industri Elektronik
- Logistik

RINGKASAN CAPAIAN KEK TRIWULAN III-2023

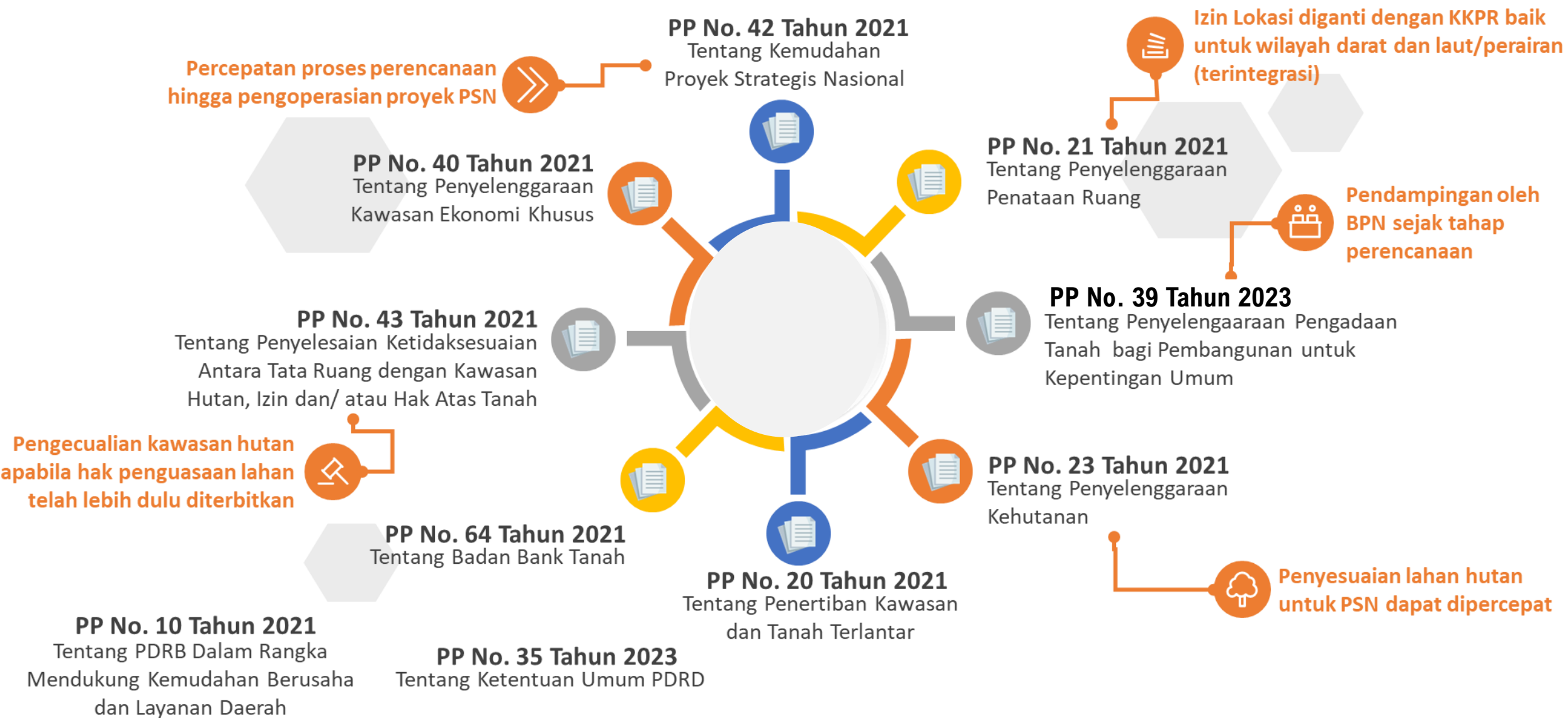
Capaian Kumulatif KEK Hingga Sept 2023



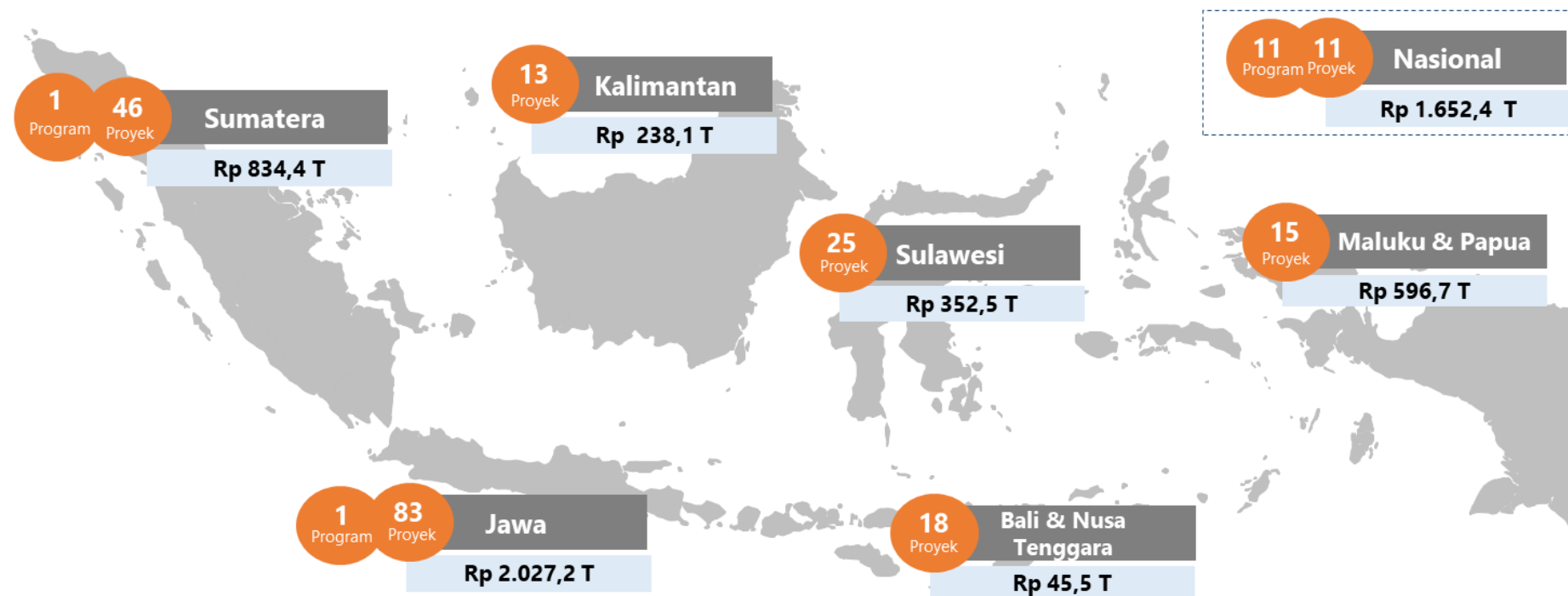
Capaian Tahun 2023



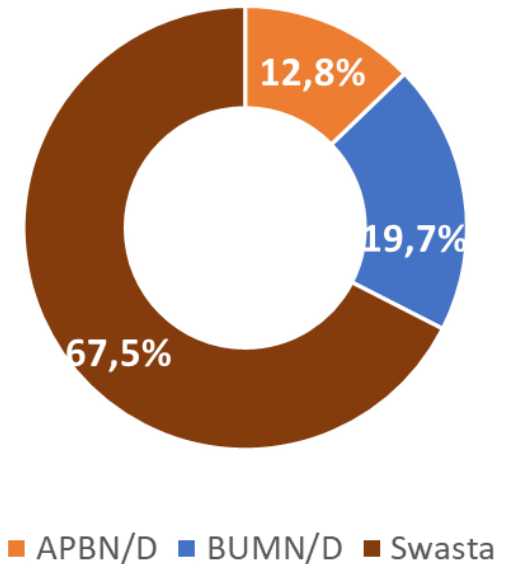
Beberapa peraturan pemerintah yang telah disesuaikan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional dan Infrastruktur strategis lainnya



BERDASARKAN PERMENKO NOMOR 7 TAHUN 2023, TERDAPAT 211 PROYEK DAN 13 PROGRAM SEBAGAI PSN DENGAN ESTIMASI TOTAL NILAI INVESTASI (CAPEX) RP 5.746,7 TRILIUN



Estimasi Nilai Investasi PSN (Konstruksi)



PSN mencakup 14 sektor pada tingkat Proyek dan 13 tingkat Program

